

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang memiliki makna kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya. Berdasarkan Mardi Yatmo (2000), pemberdayaan atau *empower* mengandung dua pengertian yaitu a) *to give power* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain, b) *to give ability* atau usaha memberi kemampuan.

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat enam konsep pemberdayaan ekonomi menurut Mardi Yatmo (2000), sebagai berikut:

- 1) Perekonomian rakyat merupakan perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, perekonomian yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar, sebab kendala

pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural maka pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui perubahan struktural.

- 3) Perubahan struktural merupakan perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan menjadi kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur meliputi pengalokasian sumber pemberdayaan, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 4) Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- 5) Kebijakan yang diterapkan dalam ekonomi rakyat yaitu pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi khususnya modal, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar pelaku tidak hanya berperan sebagai price taker, selain itu adanya pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil guna

mendorong munculnya wirausaha baru serta pemerataan spasial.

- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM selama ini berhasil menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin. Kedua, hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji lebih baik dilihat dari pencapaian tujuan maupun efisiensinya. Ketiga, dari hasil penelitian independen, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan. (Tim Koordinasi PNPM, 2007).

a. Tujuan PNPM

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2008 (Peraturan Departemen Dalam Negeri Nomor: 414.2/316 PMD) tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok usaha dalam keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan. Menyediakan prasarana dan sarana sosial dasar serta ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, melembagakan pengelolaan dana bergulir. Selain itu, mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

b. Prinsip-prinsip PNPM

Ada beberapa prinsip yang digunakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam melaksanakan setiap programnya, antara lain ialah keberpihakan

kepada orang miskin, transparan, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas, keberlanjutan, kesetaraan gender.

Adapula sasaran dari PNPM yaitu, lokasi sasaran yang mencakup seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, kelompok sasaran yang berupa RTM (rumah tangga miskin) di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM di Indonesia sebagian besar terdapat di perdesaan yang diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi desa guna mengurangi kemiskinan dan ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan karena bersifat padat karya. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan UMKM sangat menentukan kemajuan pembangunan ekonomi perdesaan.

a. Definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:

Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Usaha Menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian yang baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

- b. Di Indonesia terdapat beragam jenis sektor usaha UMKM yang secara umum dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu:

Usaha perdagangan, terdiri dari ekspor/impor, pengecer maupun sektor informal. Usaha pertanian, terdiri dari perkebunan, peternakan dan perikanan. Usaha industri, terdiri dari industri makanan dan minuman, pengrajin dan konveksi, pertambangan. Usaha jasa, terdiri dari perbengkelan, rumah makan, transportasi dan pendidikan.

- c. UMKM juga memiliki kriteria sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008, yaitu:

Kriteria Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, asas dari UMKM ialah kekeluargaan. Demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

d. Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia yaitu:

- 1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- 2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar
- 3) Pemain penting dalam pembagian kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- 5) Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor, posisi penting ini sejak di landa krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

e. Perkembangan UMKM di Indonesia

Di Indonesia UMKM lebih didominasi oleh usaha mikro yang sebagian besar berlokasi di perdesaan. Kegiatan produksi di usaha mikro khususnya pada produksi makanan,

minuman serta kerajinan relatif mudah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan modal awal yang sedikit, tidak membutuhkan pendidikan formal yang tinggi, dan tidak memerlukan tempat khusus untuk kegiatan produksi. Maka dari itu, kegiatan produksi usaha mikro lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Pendapatan dari kegiatan usaha mikro sangat penting baik sebagai sumber pendapatan utama ataupun sumber pendapatan tambahan. Usaha mikro pada umumnya merupakan unit usaha sendiri tanpa pekerja atau pemilik usaha yang melakukan semua pekerjaannya dengan sendiri (Tambunan, 2002).

Sektor UMKM akan mampu berkembang lebih baik jika tersedianya sumber permodalan dan pembiayaan yang mudah dijangkau serta adanya pendampingan untuk pembangunan kapasitas pengusaha (Tambunan, 2002). Iklim UMKM apabila dilaksanakan dengan inovasi dalam setiap kegiatan produksi usaha yang dilakukan akan berdampak pada pendapatan yang tinggi. Akan tetapi untuk mewujudkan inovasi dalam berproduksi dibutuhkan modal untuk mengembangkan usaha kearah yang lebih maju. Dengan adanya program pemberian pinjaman dana tentu menjadi solusi bagi permasalahan permodalan dalam mengembangkan usaha. Perkembangan usaha dapat dilihat melalui nilai penjualan hasil produksi atau nilai omset penjualan. Jika

setiap tahun omset hasil penjualan meningkat maka daya saing usaha tersebut tinggi.

f. Masalah dasar yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha mikro menurut (Tambunan, 2002) yaitu:

1) Kesulitan Pemasaran

Pemasaran sering dianggap menjadi salah satu kendala yang kompleks bagi perkembangan UMKM, hasil studi lintas Negara yang telah dilakukan oleh James Akrasance di sejumlah Negara ASEAN membuktikan bahwa *growth constraints* sering dihadapi oleh para pelaku usaha kecil menengah, kecuali Singapura. Salah satu aspek yang berkaitan dengan masalah pemasaran ialah adanya tekanan persaingan dalam pasar domestik dengan produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun pasar ekspor. Selain itu, keterbatasan informasi serta transportasi juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar perdagangan internasional.

2) Keterbatasan Finansial

Usaha mikro, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja seperti finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Kendala tersebut

disebabkan karena lokasi bank yang terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah relatif terisolasi, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu berbelit.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala yang serius untuk para pelaku usaha mikro di Indonesia, terutama dalam aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, organisasi bisnis, akuntansi, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Keterbatasan tersebut menghambat usaha mikro di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku juga sering menjadi salah satu kendala yang serius bagi pertumbuhan output ataupun kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang mahal dan jumlah yang terbatas.

5) Keterbatasan Teknologi

Usaha mikro di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua. Teknologi yang seperti itu tidak hanya membuat rendah total faktor produksi dan efisiensi dalam

proses produksi. Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) disebabkan oleh banyak faktor yang diantaranya ialah keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin dan alat-alat produksi baru dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi dalam produk maupun proses produksi.

g. Kelebihan dan Kekurangan UMKM.

Menurut Nayla, A. P. (2014), UMKM memiliki kelebihan dan kekurangan sama seperti usaha-usaha pada umumnya, kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain adalah:

1) Kelebihan UMKM.

- a) Pemilik memiliki kebebasan untuk bertindak atas UMKM tersebut.
- b) Meningkatkan pertumbuhan struktur ekonomi di daerah tempat berdirinya UMKM tersebut.
- c) Meningkatkan kemampuan produktif sumber daya manusia.

2) Kekurangan UMKM.

- a) Sistem produksi dan permasalahan relatif lemah.
- b) Sulit mendapatkan modal jangka panjang.

- c) Pemilik tidak mampu mengelola usaha dan sumber daya manusia.

4. Konsep Kredit

Bahasa latin kredit disebut dengan “*credere*” yang berarti percaya. Maksud dari kata percaya tersebut adalah kepercayaan antar kreditur dengan debitur, bahwa kredit yang diberikan pasti akan kembali sesuai perjanjian yang telah ditetapkan (Suyatno *et.al*, 2007). Untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur bisa dipercaya, maka perlu dilakukan analisis kredit terlebih dahulu yang mencakup latar belakang peminjam, prospek usaha, jaminan yang diberikan dan faktor lainnya agar kredit yang diberikan benar-benar aman. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Untung (2000) menyatakan bahwa kredit memiliki empat unsur yaitu tenggang waktu, kepercayaan, tingkat resiko serta objek kredit. Kredit memiliki fungsi dalam perekonomian yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan perkembangan usaha, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, serta meningkatkan pemerataan pendapatan.

a. Kredit Mikro

Berdasarkan Kesepakatan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Gubernur BI tentang Penanggulangan

Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 dan No. 4/2/KEP/GBI/2002 Tanggal 22 April 2002, menyatakan definisi kredit mikro merupakan kredit yang diberikan terhadap nasabah usaha mikro baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimiliki serta dijalankan oleh penduduk miskin dengan kriteria penduduk miskin menurut BPS yaitu kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 50.000.000.

Pembiayaan mikro menjadi hal penting dalam perkembangan UMKM khususnya dalam meningkatkan jumlah produksi. UMKM termasuk dalam jenis skala usaha yang memiliki karakteristik modal relatif kecil, sehingga dengan adanya penambahan modal dari pembiayaan mikro dapat menyebabkan peningkatan output dengan jumlah yang besar dari sebelumnya. Penambahan modal sebesar ΔC dari pembiayaan mikro akan meningkatkan jumlah output sebesar ΔQ , dalam istilah ekonomi hal tersebut disebut *increasing return to scale*. Selain itu, dalam istilah ekonomi juga terdapat prinsip pengurangan margin laba dari modal atau disebut dengan *diminishing marginal return to capital* yaitu perusahaan dengan modal yang relatif kecil seperti UMKM seharusnya memperoleh

laba yang lebih tinggi pada investasi modal mereka dibandingkan perusahaan dengan modal besar. Ketika perusahaan menginvestasikan lebih banyak modal, maka setiap penambahan satu unit modal akan menghasilkan tambahan laba yang semakin berkurang (Kusmuljono, 2009).

b. Teori Permintaan dan Penawaran Kredit

Credit crunch merupakan suatu kondisi dimana terjadi penurunan penawaran kredit perbankan akibat menurunnya keinginan bank dalam menyaurkan kedit pada suku bunga yang berlaku, hal tersebut terlihat dari meningkatnya selisih suku bunga pinjaman dan suku bunga dana serta semakin sulit persyaratan untuk memperoleh kredit. Dalam kondisi terparah, *credit crunch* terjadi dalam bentuk *credit rationing* yaitu suatu kondisi nasabah tidak mendapatkan kredit dari bank pada suku bunga berapapun.

Faktor yang menyebabkan penurunan penawaran kredit yaitu menurunnya tingkat kelayakan krdit dari debitur akibat melemahnya kondisi keuangan perusahaan, hal tersebut menyebabkan debitur dengan tingkat kelayakan kredit yang sama akan terkena pembatasan terhadap kredit untuk sektor tertentu (kredit konsumsi) atau kelompok debitur tertrntu. Selain itu, debitur yang layak memperoleh kredit juga akan ditolak karena bank tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai data calon

debitur. Penurunan penawaran kredit mendorong kenaikan suku bunga pinjaman dan ketatnya persyaratan kredit, hal ini disebabkan persoalan informasi yang membuat bank tidak dapat membedakan kualitas debitur mengenai tingkat resiko kredit sehingga bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan tingkat suku bunga bukan. Meskipun suku bunga kredit tinggi karena adanya penurunan penawaran kredit, akan tetapi permintaan terhadap kredit lebih tinggi.

c. Teori *Group Landing*

Kredit berbasis kelompok atau dikenal dengan *group landing* merupakan pemberian kredit kepada individu-individu yang tergabung dalam sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses yang tergabung dalam sebuah program. Program yang dilaksanakan biasanya ditujukan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki agunan untuk memperoleh kredit. Menurut Zeller dan Simtowe (2006) kredit berbasis kelompok ini dibuat untuk individu tetapi semua anggota kelompok bertanggungjawab terhadap pembayaran kredit tersebut. Berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab pinjaman bersama maka setiap anggota yang tidak mengalami kesulitan dapat membantu membayar anggota lain yang tidak mengalami kesulitan. Ukuran keberhasilan program pinjaman kelompok dapat dilihat dari tingkat pengembalian.

Manfaat positif yang diperoleh jika menggunakan sistem kredit berbasis kelompok dengan skema pembiayaan joint liability lending diantaranya mengurangi masalah *adverse selection*, dimana pada saat pembentukan kelompok memperhatikan mengenai kelayakan kredit sehingga dapat mencegah kredit yang beresiko tinggi. Selain itu, dapat mengurangi masalah penyimpangan moral yaitu masing-masing anggota saling mengawasi dan memantau satu sama lain guna memastikan bahwa anggota menggunakan dana kredit untuk kegiatan produktif sehingga akan menjamin pembayaran kredit.

d. Skim Kredit Program Pemerintah

Keberhasilan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berdasarkan info UMKM dalam *website* resmi Bank Indonesia, berbagai skim kredit atau pembiayaan UMKM yang diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, seperti ketahanan pangan, peternakan dan perkebunan. Peran pemerintah dalam skim kredit UMKM adalah penyediaan dan APBN untuk subsidi bunga skim kredit tersebut, sedangkan dana kredit atau pembiayaan keseluruhan berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam mempersiapkan

UMKM agar dapat dibiayai dengan sskim tersebut, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan pengaruh pinjaman dana bergulir pernah dilakukan sebelumnya, dan berikut adalah beberapa uraian penelitian terdahulu yang menjadi acuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Trisnojuwono (2017) dalam penelitiannya mengenai analisis strategi pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui dana bergulir pada lembaga pengelola dana bergulir. Dimana ada pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel yaitu pola pembiayaan, plafon pinjaman, lama usaha terhadap kinerja dana bergulir LPDB-KUMKM. Faktor pola pembiayaan menunjukkan bahwa kecenderungan pembiayaan dengan pola syariah sukses dalam pengembalian meningkat 0,326 kali dibandingkan pola konvensional. Faktor plafon pinjaman menunjukkan secara positif mempengaruhi kelancaran pengembalian secara mutlak sebesar satu kali. Faktor lama usaha menunjukkan semakin tinggi lama usaha maka kecenderungan untuk sukses dalam pengembalian semakin meningkat secara mutlak 1,004 kali. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, regresi logistik dan *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

Tri Wahyu Rejekiningsih (2009) melakukan penelitian mengenai dampak program dana bergulir bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Dalam penelitian tersebut, bantuan pinjaman atau dana perkuatan bagi usaha mandiri UKM memiliki pengaruh signifikan terhadap keempat variabel yang dipengaruhi yaitu jumlah tenaga kerja, modal usaha, omset penjualan dan keuntungan. Dari keempat variabel tersebut, kenaikan harga memiliki perbedaan yang sangat besar antara sebelum dan sesudah menerima perkuatan. Selain itu, diketahui bahwa dana bergulir berimplikasi positif terhadap penanggulangan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Penelitian ini menggunakan Uji Statistik Peringkat Berganda Wilcoxon dan Uji Korelasi Parsial. Analisis korelasi menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pinjaman maka akan meningkatkan keuntungan UKM serta meningkatkan kemampuan UKM dalam penyerapan tenaga kerja guna mengurangi tingkat kemiskinan.

Ratih Senanta (2011), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Bergulir Dan Pendampingan Terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali”. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dana bergulir, pendampingan, dan kegiatan ekonomi produktif dengan indikator pendapatan, jumlah tenaga kerja, jenis usaha. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menyatakan bahwa pinjaman dana bergulir, pendampingan, serta kegiatan usaha ekonomi produktif termasuk dalam kategori setuju. Berdasarkan hasil analisis regresi menyatakan bahwa pengaruh variabel pinjaman dana

bergulir dan pendampingan terhadap ekonomi produktif adalah 57,4%, sedangkan sisanya sebesar 43,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

I Komang Adi Wirawan (2015), melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Sektor Industri Di Kota Denpasar”. Dalam penelitian ini terdapat enam variabel yaitu dana bergulir, modal kerja, lokasi pemasaran, kualitas produk dan volume produksi terhadap pendapatan pelaku UMKM sebagai variabel yang dipengaruhi. Metode yang digunakan ialah *Path Analysis* dengan hasil analisis bahwa dana bergulir, modal kerja, lokasi pemasaran, dan kualitas produksi secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Denpasar, sedangkan volume produksi tidak berpengaruh signifikan. Modal kerja berpengaruh dominan terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Denpasar.

Fikanti Zuliastri (2012), melakukan penelitian mengenai Dampak Perguliran Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Perkembangan UMKM: Studi Kasus Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap 30 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Two Stage Least Square (2-SLS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pemberian pinjaman dana bergulir

SPPS berpengaruh nyata terhadap kinerja UMKM yaitu nilai penjualan, keuntungan, dan tenaga kerja yang meningkat.

Wiasti (2008) melakukan penelitian mengenai efektivitas penyaluran dana bergulir pada wanita pedesaan melalui pendekatanberkelompok dengan mengambil kasus pada Karya Usaha Mandiri (KUM) cabang Nanggung Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pinjaman untuk perempuan dengan berbasis kelompok terhadap perkembangan usaha dan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga nasabah KUM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 40 responden nasabah cabang Nanggung dengan jenis usaha mayoritas berdagang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pemberian pinjaman dana bergulir KUM berpengaruh nyata terhadap perkembangan usaha yaitu mempengaruhi jumlah produksi, pendapatan, dan keuntungan usaha responden.

Osa (2010) melakukan penelitian mengenai analisis dampak penyaluran dana bergulir LKM terhadap perkembangan UMKM dan penyebab kendala akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal dengan mengambil kasus BRI Unit Kramat Jati Induk di Jakarta. Jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 120 dengan 60 responden merupakan pelaku UMKM yang tidak menerima pinjaman untuk melihat faktor penyebab kendala akses UMKM pada lembaga keuangan

formal. Analisis dilakukan dengan menggunakan model persamaan simultan dengan tujuan untuk menganalisis dampak pinjaman yang diberikan BRI terhadap perkembangan UMKM. Hasil menunjukkan LKM memberikan dampak positif kepada UMKM dengan adanya pemberian kredit yaitu berpengaruh positif terhadap nilai penjualan dan penyerapan tenaga kerja luar keluarga.

Respita (2010) fokus pada analisis dampak penyaluran kKredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap perkembangan UMKM dan penyebab kendala UMKM dalam mengakses KUR dengan studi kasus pada BRI Unit Margonda Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyaluran KUR terhadap perkembangan UMKM dengan menggunakan model persamaan simultan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 responden pelaku UMKM yang menerima pinjaman KUR. Hasil penelitian menunjukkan penyaluran KUR berdampak positif terhadap perkembangan UMKM yaitu peningkatan omset usaha. Adapun dalam penyerapan tenaga kerja yang belum berpengaruh signifikan.

Chaterine Njuguna (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pinjaman dana bergulir dengan studi kasus pada kelompok wanita di Kenya. Dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah Descriptive Research Design, dengan hasil menunjukkan bahwa sangat diperlukan adanya pendidikan dan pengetahuan mengenai tata cara manajerial serta kewirausahaan terhadap kelompok

wanita di Kenya. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh negatif terhadap kinerja pinjaman dana bergulir.

Lila Utami (2015) melakukan penelitian mengenai dampak pembiayaan dana bergulir terhadap kinerja UMKM dengan jumlah populasi sebesar 50 responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Paired t test dengan membedakan omset, ongkos produksi, keuntungan serta jam kerja sebelum mendapatkan pinjaman dana bergulir dengan sesudah mendapatkan pinjaman dana bergulir. Hasil yang diperoleh adalah pinjaman dana bergulir berpengaruh terhadap omset, ongkos produksi, keuntungan dan jam kerja.

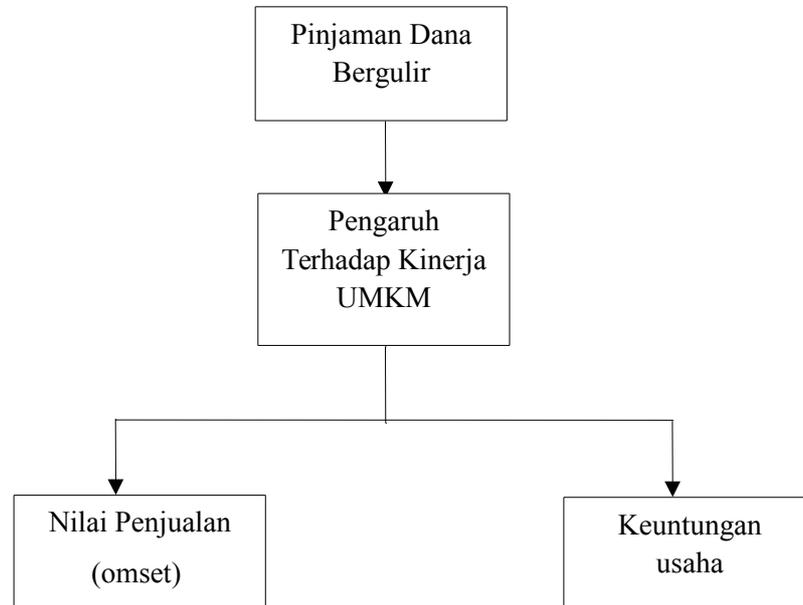
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	Trisnojuwono, Adi (2017) – <i>Analisis Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir</i>	Kinerja Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Pola Pembiayaan, Plafon Pinjaman dan Lama Usaha	<i>Analytic Hierarchy Process (AHP)</i>	Terdapat pengaruh signifikan dari ketiga variabel independen pola pembiayaan, plafon pinjaman dan lama usaha terhadap kinerja dana bergulir LPDB-KUMKM.
2	Rejekiingsih, Tri Wahyu (2009) – <i>Dampak Program Dana Bergulir Bbagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</i>	Dana Bergulir, Jumlah Tenaga Kerja, Modal Usaha, Omset Penjualan dan Keuntungan	<i>Uji Statistik Peingkat Berganda Wilcoxon</i>	Dengan adanya dana bergulir jumlah tenaga kerja, modal, keuntungan, dan omset mengalami peningkatan. Serta berimplikasi positif terhadap penanggulangan

				kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja
3	Senanta, Ratih (2011) – <i>Pengaruh Dana Bergulir dan Pendampingan Terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif Pada PNPM Mandiri di Kecamatan Karanggede</i>	Dependen: Kegiatan Ekonomi Produktif Independen: Dana Bergulir dan Pendampingan	<i>Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS</i>	Pinjaman dana bergulir dan pendampingan serta kegiatan ekonomi produktif termasuk dalam kategori setuju. Terdapat pengaruh positif antara dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan UEP
4	Wirawan, I Komang (2015) – <i>Pengaruh Dana Bergulir, Modal Kerja, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM</i>	Dependen : Pendapatan UMKM Independen: Dana Bergulir, Modal, Lokasi Pemasaran dan Kualitas Produk, Volume Produksi	<i>Path Analysis</i>	Dana bergulir, modal kerja dan lokasi pemasaran dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM, sedangkan volume produksi tidak berpengaruh signifikan.
5	Zuliastri, Fikanti (2012) – <i>Dampak Perguliran Dana Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Perkembangan UMKM</i>	Dependen: Pinjaman dan bergulir SPP Independen: Omset penjualan, keuntungan, tenaga kerja	<i>Regresi Linier Berganda Menggunakan Two Stage Least Square</i>	Adanya pengaruh pinjaman dana bergulir SPP terhadap perkembangan UMKM berdasarkan omset, keuntungan dan tenaga kerja
6	Wiasti, Ika (2008) – <i>Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir Pada Wanita Perdesaan Melalui Pendekatan Kelompok</i>	pinjaman dana bergulir, Jumlah produksi, pendapatan dan keuntungan usaha	<i>Regresi Linier Berganda Ordinary Least Square</i>	Pemberian pinjaman berpengaruh terhadap jumlah produksi, pendapatan dan keuntungan

7	Osa, I.K. (2010) – <i>Analisis Dampak Penyaluran Dana Bergulir LKM terhadap perkembangan UMKM dan Penyebab Kendala Akses UMKM Terhadap Lembaga Keuangan Formal</i>	pemberian dana bergulir LKM, Omset UMKM dan penyerapan tenaga kerja	<i>Regresi Linier Berganda</i>	Adanya pemberian kredit LKM berpengaruh positif terhadap nilai omset UMKM dan penyerapan tenaga kerja
8	Respita, Elsha (2010) – <i>Analisis Dampak Penyaluran Dana Bergulir Terhadap Perkembangan UMKM</i>	Dana bergulir, omset dan tenaga kerja	<i>Regresi Linier Berganda</i>	Penyaluran dana bergulir berdampak positif terhadap peningkatan omset usaha, sedangkan terhadap penyerapan tenaga kerja belum berdampak positif
9	Njuguna, Catherine (2014) - <i>Factors Influencing Performance Of Revolving Loan Fund Programmes: A Case Of Women Groups In Kikuyu Distri Ct, Kiambu County, Kenya</i>	Kinerja program pinjaman dana bergulir, tingkat pendidikan, praktik manajemen, kewirausahaan	<i>Descriptive Research Design</i>	Studi menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah di antara anggota kelompok memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pinjaman dana bergulir.
10	Utami, Lila (2015) – <i>Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR Terhadap Kinerja UMKM</i>	Dana bergulir, omset penjualan, ongkos produksi, keuntungan dan jam kerja	<i>Uji Paired t Tesr</i>	Adanya pinjaman dana bergulir KUR berpengaruh positif terhadap perbedaan rata-rata omset, ongkos produksi, keuntungan dan jam kerja

C. Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Diduga terdapat pengaruh besar pinjaman terhadap nilai penjualan dan keuntungan yang diperoleh para UMKM di Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul.

H₂ : Diduga terdapat perbedaan antara nilai penjualan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana.

H₃ : Diduga terdapat perbedaan antara keuntungan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dana.